

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh : Maryono dan Ida Nurhayati
Dosen Fak. Ekonomi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

**REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY AND TAX IN
CENTRAL JAVA PROVINCE**

Maryono¹⁾ and Ida Nurhayati²⁾

Abstract

Act No. 28 of 2009 on Regional Tax and Levies entered into force in 2010 has two important considerations. The second thing to be considered the birth is: that the local taxes and levies is one important source of revenue to finance the implementation of local government and in order to improve service to the public and local independence, is necessary to expand the area to tax and levies and granting discretion in tariff setting. The aims of study to analyze the financial and tax areas of Central Java province.

The parameters used are revenue performance calculation and analysis (Regional Own Revenue / PAD) and local taxes through Elasticity Size, Share, and Growth; data used in this study in the form of a data realization Central Java provincial budget in 2008 sapa to 2011

Results of this study found: 1. Revenue growth from year to year has increased, which in 2009 grew 8.15%, in 2010 grew 10.43% and 15.18% growth in 2011. 2. PAD contribution to the Revenue and Expenditure (Budget) for four consecutive years at the rate of 70%. 3. PAD Elasticity to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in 2009 of 0.85, 0.89 in 2010, and in 2011 at 1.25.

Keywords: tax law, regional own revenue growth, share of regional own revenue, elasticity of regional own revenue.

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (*incremental*) tanpa merubah jenis atau pos belanja (*line-item*). Pendekatan atau sistem tersebut disebut sebagai sistem anggaran tradisional (*line-item and incremental budgeting*). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29/2002 sebagai penjabaran dari UU No. 22/1999 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai *guidance* dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan perubahan dan perkembangan yang terjadi maka peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 yang diikuti dengan amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No. 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006. Perubahan peraturan ini dimaksudkan agar dapat kelemahan- kelemahan para peraturan sebelumnya dapat dihindari dan dapat mengakomodasi kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah cukup tinggi, namun juga terdapat beberapa daerah yang sangat minim kemampuan keuangan daerahnya. Penelitian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap APBD pemerintah provinsi se Indonesia tahun 2001 dan 2002 menunjukkan hanya 7 (tujuh) provinsi) yang memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi dengan indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah yang tinggi dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah yang tinggi (kuadran 1). Ke tujuh provinsi tersebut adalah : Bali, Banten, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Provinsi yang masuk dalam kuadran 2 yaitu yang memiliki kontribusi PAD yang tinggi namun pertumbuhannya rendah meliputi : Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Sulawesi Tengah. Provinsi yang masuk dalam kuadran 3 yaitu memiliki kinerja pertumbuhan PAD yang tinggi namun kontribusi PAD terhadap pendapatan total rendah terdiri dari : Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Jambi, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Terakhir provinsi yang masuk dalam kuadran 4 yaitu memiliki kinerja pertumbuhan PAD yang rendah dan kontribusi PAD terhadap pendapatan total juga rendah meliputi : Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Papua, dan Sulawesi Utara.

Kondisi tersebut di atas merupakan salah satu yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru tentu saja juga akan berpengaruh terhadap

penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-undang tersebut memuat jenis dan retribusi daerah serta batas tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang ini pajak daerah provinsi meliputi : Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Namun untuk jenis pajak rokok pemberlakuannya baru akan dilaksanakan mulai tahun 2014 sehingga dampaknya terhadap pendapatan daerah provinsi juga baru pada tahun 2014 tersebut. Sedangkan dalam undang-undang tersebut juga mengurangi pajak yang semula menjadi pajak daerah provinsi namun kemudian menjadi pajak daerah kabupaten / kota yaitu pajak air tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan keuangan serta kontribusi pajak daerah antara sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru khususnya pada provinsi Jawa Tengah. Untuk itulah penelitian ini mengambil judul “ KEMAMPUAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH “.

B. RUMUSAN MASALAH

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari Total Penerimaan Daerah seharusnya mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini mengingat bahwa beban daerah otonom yang semakin meningkat pula dari tahun ke tahun. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mengindikasikan adanya sumber pendapatan asli daerah yang memang potensial serta menunjukkan adanya usaha pemerintah setempat dalam menggalai potensi daerah melalui berbagai kebijakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi desentralisasi.

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah menunjukkan derajat kemandirian daerah otonom dalam membiayai pengeluarannya. Semakin besar persentase Penerimaan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri. Sebaliknya bila persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan ketidakmandirian daerah dalam memenuhi kebutuhannya.

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto merupakan perbandingan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Semakin besar elastisitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Bila sebaliknya dimana elastisitas rendah maka berarti pemerintah daerah tidak mampu memanfaatkan pertumbuhan perekonomian daerah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 2008 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?

2. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Bagaimana elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
2. Menganalisis perkembangan peran Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 2011
3. Menganalisis elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto.
4. Menganalisis perkembangan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai tahun 2011.
5. Menganalisis perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi :

1. Memahami secara lebih baik atas potret atau keadaan yang senyatanya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan relevansinya terhadap kemandirian keuangan daerah
2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang kebijakan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORITIS

1. Desentralisasi

Menurut Pratikno (2005), pola hubungan pusat - daerah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru merupakan pola hubungan yang sentralistis. Dalam pola hubungan yang sentralistis ini pemerintah pusat mendominasi segala segi pemerintahan. Ciri utama yang melekat adalah perencanaan dan pengendalian yang terpusat yang mengharuskan adanya sistem organisasi pemerintahan dan manajemen proyek yang dikembangkan di daerah dengan tujuan agar hasilnya mudah diukur, dikendalikan, diawasi dan dievaluasi.

Pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Litvack dan Seddon (1999:2) berpendapat bahwa desentralisasi diartikan sebagai *"the transfer of authority and*

responsibility for public from the central government to subordinate or quasi - independent government organization, or the private sector". Hal ini berarti bahwa apabila sumber - sumber kewenangan berpusat hanya pada pemerintah sebagai institusi tertinggi yang mewakili Negara, maka secara bertahap perlu dilakukan transfer kewenangan dan tanggung jawab kepada institusi di luar pemerintah pusat.

Rondinelli (1981, 1989) menekankan desentralisasi sebagai "transfer of political power". Sejalan dengan pendapat tersebut, Wasistiono (2005) menyatakan bahwa desentralisasi sendiri memiliki dua kelompok tujuan yakni politik dan administratif. Tujuan politiknya adalah demokratisasi, sedangkan tujuan administratifnya adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Leemans (1970) membedakan dua macam desentralisasi : *representative local government* dan *field administration*. Sejalan dengan hal tersebut Maddick (2004) menyatakan bahwa desentralisasi menyangkut proses dekonsentrasi dan devolusi. Dekonsentrasi adalah pendelegasian kewenangan yang cukup untuk melepaskan fungsi - fungsi khusus kepada staf dan suatu departemen pusat yang berada di luar kantor pusat. Devolusi merupakan pemberian kekuasaan secara sah untuk melepaskan fungsi yang ditentukan atau fungsi sisa pada kewenangan lokal yang diberlakukan secara formal. Iglesias dalam Lay (1997) mengkonsepsikan desentralisasi sebagai desentralisasi politik yang bentuknya adalah daerah - daerah otonom, dan desentralisasi administratif yang menghasilkan *local state government* dalam bentuk wilayah - wilayah administratif.

2. Otonomi Daerah

Menurut Imawan (2005) otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Daerah otonom merupakan wujud nyata dan diadunnya asas devolusi dan dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi sendiri. Dalam konteks ini, otonomi harus dipahami secara fungsional. Maksudnya, orientasi otonomi seharusnya pada upaya pemaksimalan fungsi pemerintahan (pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan) agar dapat dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan Imawan (2005), Chaidir (2005) menyatakan bahwa otonomi merupakan wujud nyata desentralisasi. Dalam bahasa yang sederhana otonomi adalah suatu keadaan yang tidak tergantung pada siapa pun. Dalam bahasa yang lebih politis, dalam konteks hubungan pusat - daerah, otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur sistem administrasi birokrasi, keuangan, kebijakan publik, dan hal - hal lain, dalam batasan - batasan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Dengan adanya otonomi sebuah pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran akan lebih dimungkinkan. Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Kinerja Daerah

Keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kinerja dan Pemerintah Daerah (Syaukani, 2005). Walaupun kinerja pemerintah daerah bukanlah faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah namun perlu perhatian dan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, secara simultan juga harus dilakukan peningkatan faktor - faktor lainnya. Syaukani (2005) mengemukakan bahwa antara implementasi kebijakan otonomi daerah dan kinerja pemerintah daerah dapat ditarik hubungan sebab akibat yang cukup signifikan. Antara kedua kondisi tersebut saling mempengaruhi, selain implementasi otonomi daerah dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, sebaliknya kinerja pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh implementasi kebijakan otonomi daerah.

Seiring dengan berkembangnya konsep tentang pembangunan, sisi pembiayaan tidaklah menjadi satu-satunya acuan kinerja pemerintahan suatu wilayah. Amrullah Harun dan Pan Budi (2006) menyatakan bahwa "Dalam paradigma pembangunan tradisional yang dikenal dengan '*The first fundamental theory of welfare economics*', menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai satu-satunya tujuan pembangunan dengan mengabaikan pertumbuhan sektor non ekonomi, dengan asumsi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut akan diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang rendah, sehingga pada akhirnya manfaat pembangunan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan paradigma tersebut, kinerja suatu daerah hanya dinilai dari aspek makro secara ekonomi, yaitu dari (1) kemampuan daerah tersebut untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan daerah bruto (*Product Domestic Regional Brutto*) atau pertumbuhan ekonomi, (2) tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita riil (*income regional per capita*) yaitu PDRB per kapita yang telah dikurangi dengan faktor inflasi, dan (3) tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumberdaya, yang biasanya diindikasikan oleh pergeseran struktur produksi dan sector pertanian ke sektor industri. Ketiga indikator makro ekonomi tersebut membawa implikasi penciptaan industrialisasi yang sering kali tidak memiliki *backward* dan *forward linkage* dengan sektor lain dan bahkan dengan mengorbankan sektor pertanian dan pedesaan sebagai sektor terbesar penyumbang PDRB dan tenaga kerja. Industrialisasi diyakini mampu membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Walau relatif berhasil mencapai tujuan pertumbuhan, namun paradigma ini kemudian menimbulkan berbagai masalah serius dalam pembangunan seperti kemiskinan dan pengangguran yang meluas, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terabaikan maupun berbagai persoalan sosial lainnya". Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pembangunan yang menekankan pentingnya pertumbuhan banyak dipersoalkan, karena disadari bahwa tolok ukur kinerja daerah yang murni bersifat ekonomi harus pula didukung oleh tolok ukur yang bersifat non ekonomi. Amrullah Harun dan Pan Budi (2006) selanjutnya menyatakan bahwa "Paradigma pembangunan daerah pun kemudian mulai bergeser ke arah pembangunan yang seimbang. Paradigma ini mengungkap kembali pentingnya '*the second fundamental theory of welfare economics*' yaitu

keseimbangan pembangunan ekonomi dan non ekonomi. Strategi pembangunan kini lebih memberikan penekanan utama kepada manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan. Hal terpenting di sini adalah bagaimana memperluas pilihan-pilihan penduduk untuk hidup lebih panjang, lebih terdidik dan lebih mendapatkan akses terhadap sumberdaya untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Karenanya indikator pembangunan atau kinerja suatu daerah juga mengalami perubahan. Disamping pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kinerja daerah juga dinilai dan berbagai indikator kemajuan makro sosial”.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kinerja daerah terukur melalui kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kaho (1997) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah self-supporting dalam bidang keuangan. Hal ini berarti bahwa keuangan merupakan factor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan belanja daerah yang wajar, efisien dan efektif (Aslym, 1999). Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar control kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD, sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. Kinerja PAD terukur melalui Ukuran Elastisitas, *Share* dan *Growth* (www.perpustakaan.bappenas.go.id). Kombinasi indeksasi dan ketiga ukuran tersebut merupakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang sekaligus digunakan dalam menilai kinerja daerah dalam pengelolaan input. Selanjutnya Bappenas menyatakan bahwa adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan *share* merupakan rasio PAD terhadap belanja daerah (belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik). Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan aparatur daerah dan kegiatan pelayanan publik. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah, dan *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dan tahun $i-1$.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Ni Made Inna Dariwardani dan Siti Noor Amani berjudul Kinerja Provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan kinerja keuangan daerah provinsi di Indonesia sebelum dan setelah diimplementasikannya otonomi daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel 19 provinsi dari 33 provinsi yang ada dengan pertimbangan keterbandingan dan ketersediaan data. Periode referensi yang digunakan selama 8 tahun dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006. Untuk mengetahui perbedaan kinerja provinsi tersebut digunakan dua

indicator yaitu Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua indikator tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kuadran dan uji statistic t berpasangan. Analisis kuadran pada dasarnya digunakan untuk memetakan provinsi-provinsi berdasarkan indikator - indikator tertentu. Seluruh provinsi akan dikelompokkan ke dalam empat kuadran sesuai kondisi kinerja masing-masing daerah. Sebelumnya akan dilakukan pengelompokan provinsi berdasarkan kinerja PAD dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). IKK merupakan rata-rata hitung dari Indeks Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Pertumbuhan (*Growth*) PAD, Elastisitas PAD dan *Share* PAD. Selanjutnya juga dilakukan Uji statistik-t berpasangan (*paired t-test*) digunakan untuk melihat secara statistic apakah pemberlakuan otonomi daerah signifikan mempengaruhi kinerja 19 provinsi yang diamati, berdasarkan indikator kinerja IKK dan IPM. Berdasarkan Uji statistik-t berpasangan (*paired t-test*) yang digunakan untuk melihat secara statistik apakah pemberlakuan otonomi daerah signifikan mempengaruhi kinerja 19 provinsi yang diamati, berdasarkan indikator kinerja IKK dan IPM, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tingkat kepercayaan 95 persen kinerja 19 provinsi amatan secara signifikan mengalami kenaikan setelah pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari indikator IPM; 2. Berdasarkan indikator IKK, pada tingkat kepercayaan 95 persen dapat dikatakan setelah pelaksanaan otonomi daerah kinerja 19 provinsi di Indonesia meningkat secara signifikan.

G. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sampel penelitiannya adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011

2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan baik data sekunder yang berupa data Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto yang menjadi sample penelitian selama 5 tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Sumber data sekunder ini berupa studi pustaka dan dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Jawa Tengah maupun dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang relevan.

3. Teknik Analisis

a. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = (\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}) / \text{PAD}_{t-1}$$

Dimana :

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t-1

b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi PAD} = \text{PADt} / \text{TPDt}$$

Dimana :

PADt = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

TPDt = Total Penerimaan Daerah pada tahun t

- c. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengukur elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto digunakan rumus :

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB} = \frac{(\text{PADt} - \text{PADt-1}) / \text{PADt-1}}{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}) / \text{PDRBt-1}}$$

Dimana :

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun t

PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun t-1

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun t

PDRBt-1 = Produk Demestik Regional Bruto tahun t-1

- d. Pertumbuhan Pajak Daerah

Untuk mengukur pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus :

$$\text{Pertumbuhan PD} = (\text{PDt} - \text{PDt-1}) / \text{PDt-1}$$

Dimana :

PDt = Pajak Daerah pada tahun t

PDt-1 = Pajak Daerah pada tahun t-1

- e. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi PD} = \text{PDt} / \text{PADt}$$

Dimana :

PDt = Pajak Daerah pada tahun t

PADt = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

I. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di pulau Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota dengan luas wilayah pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa atau 1,70 persen dari luas wilayah Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 573 kecamatan dan 8.578 desa / kelurahan. Pada tahun 2011 jumlah Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 17.730 orang. Jumlah pegawai menurut pendidikan yang ditamatkan berturut-turut adalah tamat / tidak tamat SD (

4,81 persen), SLTP (5,64 persen), SMU (32,07 persen), Sarjana Muda / Diploma (15,32 persen), Sarjana (42,16 persen). Berdasarkan kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah jumlah PNS berdasarkan golongan I, II, III, dan IV pada tahun 2011 berturut-turut sebesar 3,63 persen, 28,98 persen, 59,48 persen dan 7,91 persen.

Berdasarkan angka sementara proyeksi sensus penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2011 tercatat sebesar 32,64 juta atau sekitar 13,54 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Ini ditunjukkan dengan rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan yang sebesar 99,42.

Penduduk yang bersekolah selama periode tahun pelajaran 2010/2011 – 2011/2012 terjadi penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan SD sebesar 2,31 persen, sedangkan SLTP mengalami peningkatan 0,25 persen dan tingkat SLTA meningkat sebesar 4,04 persen. Penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang pendidikan. Tahun 2011/2012 jumlah guru SD naik sebesar 7,78 persen, SLTP naik sebesar 0,18 persen, dan guru SLTA naik sebesar 0,87 persen.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional, oleh karena itu produktivitas padi lebih diutamakan untuk terus dipacu. Pada tahun 2011, produktivitas padi sekitar 54,47 kuintal per hektar, menurun 2,95 persen dibandingkan produktivitas tahun sebelumnya. Begitu pula dengan luas panen padi dan produksi padi juga mengalami penurunan masing-masing 4,28 persen dan 7,11 persen.

Perusahaan industri besar dan sedang di Jawa Tengah pada tahun 2011 tercatat 3.887 unit perusahaan dengan 734,9 ribu orang tenaga kerja. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah ini mengalami penurunan 7,74 persen, sedangkan jumlah tenaga kerja naik 9,02 persen. Pada tahun 2010 nilai output industri besar dan sedang mencapai 151 triliun rupiah, lebih tinggi 6,51 persen bila dibandingkan tahun 2009. Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga pasar naik dari 47,43 triliun rupiah pada tahun 2009 dan menjadi 57,46 triliun rupiah pada tahun 2010. Nilai tambah bruto terbesar dihasilkan oleh industri pengolahan tembakau yaitu senilai 14,57 triliun rupiah dan mempekerjakan 118 ribu orang. Nilai tambah bruto kedua dihasilkan oleh industri pengolahan tekstil dengan NTB sebesar 11,34 triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 135 ribu orang. Pada tahun 2011 di Jawa Tengah terdapat 644,3 ribu perusahaan kecil dan menengah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,93 juta orang. Jumlah produksi industri kecil dan menengah pada tahun yang sama mencapai 6,3 triliun rupiah atau meningkat 15,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pasar merupakan tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, dimana konsumen dapat berbelanja lebih efisien. Di Jawa Tengah tahun 2011 tercatat sebanyak 1.561 unit pasar tradisional, departemen store 53 unit, pasar swalayan 589 unit dan 26 pusat perbelanjaan. Perolehan devisa sector minyak dan gas yang cenderung menurun, telah memacu sector non migas untuk berkembang. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai ekspor Jawa Tengah pada tahun 2011 yang mencapai 4,69 milyar dolar Amerika, terdiri dari ekspor migas sebesar 9,21 persen, dan ekspor non migas sebesar 90,79 persen.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di seluruh Jawa Tengah pada tahun 2011 mencapai 26,41 ribu kilometer. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan nasional sepanjang 1,39 ribu kilometer, jalan provinsi 2,57 ribu kilometer, dan jalan kabupaten / kota 22,46 ribu kilometer. Banyaknya kereta api penumpang di Jawa Tengah tercatat sebanyak 143 buah pada tahun 2011, berarti jumlahnya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya penumpang kereta api sampai dengan Desember 2011 mencapai 4,1 juta penumpang dengan penerimaan mencapai 213,44 milyar rupiah.

Pengembangan kepariwisataan dewasa ini sangat penting bukan hanya dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2011 banyaknya usaha akomodasi di Jawa Tengah sebanyak 1.368 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 30.738 kamar. Di antara usaha akomodasi tersebut, 131 usaha atau 9,58 persennya merupakan hotel-hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel berbintang dengan jumlah kamar sebanyak 8.736 kamar. Sementara jumlah usaha akomodasi lainnya tercatat sebanyak 1.237 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 22.002 kamar.

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2011 terhimpun sekitar 5,09 triliun rupiah naik sekitar 13,18 persen bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2010. Pajak daerah memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 4,6 triliun rupiah atau sebesar 90,38 persen dari total pendapatan asli daerah. Sejalan dengan realisasi pendapatan asli daerah, realisasi dana perimbangan tahun anggaran 2011 sebesar 1,95 triliun rupiah atau naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu untuk realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2011 sebesar 5,85 triliun rupiah atau naik 17,01 persen dari tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan perekonomian daerah tidak terlepas dari peranan investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah, dimana realisasi investasi pada tahun 2011 penanaman modal daerah dalam negeri (PMDN) sebanyak 24 proyek dengan total investasi sebesar 775,83 milyar rupiah

dan 2.300,5 ribu USD dengan perkiraan tenaga kerja yang terserap sebanyak 63.365 orang. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 35 proyek dengan penyerapan tenaga kerja diperkirakan sebanyak 26 ribu orang dan nilai investasi sebesar 1.347,74 milyar rupiah dan 24.077,98 ribu USD.

Inflasi yang terjadi di suatu daerah menjadi tolok ukur tentang kestabilan perekonomian daerah tersebut. Tingkat inflasi kota Semarang tahun 2011 (2,87 persen) lebih rendah bila dibandingkan tingkat inflasi nasional (3,79 persen). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga yang terjadi di kota Semarang lebih rendah bila dibandingkan dengan perubahan harga secara nasional. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka inflasi kota Semarang lebih rendah dimana tahun 2010 inflasi sebesar 7,11 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2011 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 6,01 persen sementara tahun 2010 hanya 5,84 persen. Hal tersebut sangat beralasan mengingat kondisi perekonomian di Jawa Tengah relative terus membaik sejak terjadinya krisis global tahun 2008. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2011 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sector pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,56 persen dan yang terendah adalah pada sector pertanian yang hanya sebesar 1,31 persen.

Sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Jawa Tengah yaitu sebesar 33,31 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,74 persen. Sektor perdagangan, perhotelan dan restoran di Jawa Tengah juga memberikan kontribusi yang tinggi sebesar 19,71 persen dengan pertumbuhan riil 7,53 persen. Sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan sektoral terendah masih memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Jawa Tengah cukup tinggi yaitu sebesar 19,07 persen.

2. PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi demikian ini tentu saja sangat menggembirakan karena dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah akan dapat mendorong peningkatan pendapatan secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan asli daerah juga akan dapat meningkatkan kemampuan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2008 pendapatan asli daerah berjumlah hamper 3,7 triliun rupiah, tahun 2009 sebesar 4 triliun rupiah lebih, tahun 2010 sebesar 4,4 triliun lebih dan pada tahun 2011 pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah

sebesar lebih dari 5 triliun rupiah. Dari besaran pendapatan asli daerah tersebut maka pertumbuhan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 mencapai 8,16 persen, tahun 2009 tumbuh 10,34 persen, dan tahun 2011 pendapatan asli daerah tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 15,18 %. Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang demikian ini tentu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah sehingga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber pada pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendadapatan asli daerah. Secara lengkap besaran pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat terlihat dalam table berikut.

Tabel 1
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2011

TAHUN	PAD	PERTUMBUHAN
2008	3,698,843,476.00	
2009	4,000,735,711.00	8.16%
2010	4,417,869,229.53	10.43%
2011	5,088,713,212.54	15.18%

Sumber : DPPKAD Provinsi Jawa Tengah

3. KONTRIBUSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah konsisten di atas angka 70 persen. Kontribusi sebesar di atas angkat 70 persen ini tentu saja menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dikategorikan cukup mandiri karena sebagian besar pendapatannya berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini tentu saja menggembirakan karena dalam kurun waktu yang sama masih ada derah provinsi yang kontribusi pendadapatan asli daerahnya masih relative kecil yaitu di bawah 50 persen.

Bila dilihat dari pendapatan asli daerah yang dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan termasuk persentase pertumbuhannya mestinya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah meningkat. Namun karena total pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah juga mangalami peningkatan yang proporsional dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah konsisten pada angka berkisar 70 persen.

Secara lengkap data tentang pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011

TAHUN	PAD	PENDAPATAN	KONTRIBUSI
2008	3,698,843,476.00	5,203,027,494.00	71.09%

2009	4,000,735,711.00	5,696,660,051.00	70.23%
2010	4,417,869,229.53	6,229,527,178.68	70.92%
2011	5,088,713,212.54	7,038,908,737.17	72.29%

Sumber : DPPKAD Provinsi Jawa Tengah

3. ELASTISITAS PAD TERHADAP PDRB.

Produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 selalu mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini mampu dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Elastisitas pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 0,85, tahun 2010 besarnya elastisitas 0,89 dan tahun 2011 besarnya elastisitas pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto 1,25.

Secara keseluruhan dari tahun 2008 sampai dengan 2011 elastisitas pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto daerah Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi khususnya pada tahun 2011 yang di atas angka 1. Elastisitas yang tinggi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun lain-lain pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, dan elastisitas pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dibaca dalam table berikut.

Tabel 3
PAD, PDRB, ELASTISITAS PAD TERHADAP PDRB
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN 2011

TAHUN	PAD	PDRB	PAD	PDRB	Elastisitas
2008	3,698,843.00	362,938,708.25			
2009	4,000,735.00	397,903,943.75	0.08	0.10	0.85
2010	4,417,859.23	444,692,914.59	0.10	0.12	0.89
2011	5,088,713.21	498,614,636.36	0.15	0.12	1.25

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4. PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 selalu mengalami kenaikan berkisar 5 persen hingga 20 persen lebih. Peningkatan penerimaan dari pajak daerah ini tentu saja sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah sumber pembiayaan pemerintahan meningkat yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sumber penerimaan pajak daerah bagi pemerintah provinsi terdapat penambahan jenis pajak baru tetapi juga terdapat pengurangan jenis pajak daerah yang dapat dipungut. Penambahan pajak baru dari pemerintah provinsi yaitu pajak rokok yang pemungutannya baru akan dilaksanakan pada tahun 2014 seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Sedangkan pengurangan pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah provinsi yaitu pajak air tanah yang selanjutnya berdasarkan undang-undang menjadi sumber penerimaan pajak daerah bagi kota dan kabupaten.. Berikut adalah data penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 seperti dalam table berikut.

Peningkatan penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yaitu adanya pertumbuhan jumlah kendaraan di Jawa Tengah khususnya maupun secara nasional yang memang sangat tinggi. Bahkan untuk tahun 2010 penjualan mobil baru di Indonesia menembus angka satu juta unit yang bila dibandingkan dengan negara Thailand yang sebelumnya selalu lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia pada tahun tersebut lebih banyak mobil baru yang terjual di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia secara menyeluruh yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi sementara di beberapa negara Eropa maupun negara maju lain masih mengalami masalah ekonomi. Dengan peningkatan jumlah kendaraan ini berarti meningkat pula obyek pajak yang berasal kendaraan bermotor baik bea balik nama kendaraan bermoto, pajak kendaraan bermotor, maupun pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Khusus di provinsi Jawa Tengah juga terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2008 sejumlah 7.223.502 unit, tahun 2009 sejumlah 8.369.385 unit, tahun 2010 sejumlah 9.087.465 unit dan tahun 2011 sejumlah 10.240.380 unit. Dalam rangka peningkatan jumlah kendaraan bermotor khususnya yang keberadaannya di wilayah provinsi Jawa Tengah pemerintah provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dari luar wilayah Jawa Tengah dan masuk ke wilayah Jawa Tengah. Dengan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ini diharapkan masyarakat yang melakukan pembelian atau mendapatkan hak atas kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah Jawa Tengah mendapatkan kemudahan dan keringanan karena tidak harus membayar bea balik nama. Setelah kendaraan bermotor beralih di wilayah Jawa Tengah maka pemerintah daerah setiap tahun akan mendapatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain karena jumlah kendaraan bermotor yang bertambah pada tanggal 1 Mei 2011 pemerintah provinsi Jawa Tengah juga secara resmi memberlakukan tariff progresif untuk pajak kendaraan bermotor yang dikenakan pada kendaraan jenis mobil dan kendaraan roda 2 di atas 200 cc.

Tabel 4

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2011

TAHUN	PAJAK DAERAH	PERTUMBUHAN
-------	--------------	-------------

2008	3,052,380,691.45	
2009	3,219,901,598.65	5.49%
2010	3,875,930,449.68	20.37%
2011	4,599,046,986.90	18.66%

Sumber : DPPKAD Provinsi Jawa Tengah

Bila dicermati sumber penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga sampai tahun 2011 tersebut yang paling besar kontribusinya adalah pajak daerah yang berhubungan dengan kendaraan bermotor yang mencapai 99 persen lebih. Pajak – pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor tersebut meliputi tiga jenis pajak daerah yaitu bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB). Sedangkan sisanya yang kurang dari 1 persen diperoleh dari pajak air tanah yang berlaku hingga tahun 2010 dan pajak air permukaan yang masih tetap berlaku sesuai dengan undang – undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Berikut adalah data penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga tahun 2011 berdasarkan jenis pajak daerahnya.

Tabel 5
Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2011
Berdasarkan jenis pajak daerah

JENIS PAJAK	2010	%	2011	%
Jumlah Pajak	3,893,699,996.50	100.00%	4,599,046,986.90	100.00%
PKB	1,544,313,644.03	39.66%	1,755,017,905.67	38.16%
BBN KB	1,525,124,469.22	39.17%	1,957,340,064.57	42.56%
Pajak BBKB	806,492,336.43	20.71%	878,834,711.01	19.11%
Pajak PABT	10,759,407.66	0.28%	-	
Pajak PAP	7,010,136.16	0.18%	7,854,305.65	0.17%

5.KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD DAN TOTAL PENDAPATAN

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dimana tahun 2008 sebesar 82,52 %, tahun 2009 mengalami penurunan kontribusinya menjadi 80,48 %. Pada tahun 2009 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kembali meningkat menjadi 87,73 % dan pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan menjadi 90,38 %. Dari angka kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat besar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa Tengah. Dan mengingat lebih dari 99 % pajak daerah adalah berasal dari kendaraan bermotor maka keberadaan kendaraan bermotor di Jawa Tengah ini sangat menentukan bagi penerimaan pajak daerah. Berikut data secara lengkap tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga tahun 2011 seperti terlihat dalam table berikut :

Tabel 5
Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2011

TAHUN	PAJAK DAERAH	PAD	KONTRIBUSI
2008	3,052,380,691.45	3,698,843,476.00	82.52%
2009	3,219,901,598.65	4,000,735,711.00	80.48%
2010	3,875,930,449.68	4,417,869,229.53	87.73%
2011	4,599,046,986.90	5,088,713,212.54	90.38%

Sumber : DPPKAD Provinsi Jawa Tengah

Seperti pada pendapatan asli daerah, kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan sebesar 58,67 persen, tahun 2009 turun menjadi 56,52, tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 62,22 persen, dan tahun 2011 kembali meningkat menjadi 65,34 persen. Dengan demikian kontribusi pajak daerah di provinsi Jawa Tengah memberikan andil yang sangat besar karena lebih dari 50 persennya berasal dari pajak daerah.

Bila dikaitkan dengan belanja daerah yang harus laksanakan oleh pemeringah daerah provinsi Jawa Tengah maka kualitas pendapatan dari pajak daerah ini sangat tinggi mengingat tingkat kepastian baik dalam jumlah maupun penerimaannya relative sangat tinggi. Berbeda dengan pembayaran jenis pajak yang lain maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor relative lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak jenis lainnya. Hal ini bias dikarenakan adanya mobilitas pemilik kendaraan bermotor yang akan merasa lebih nyaman dan aman bila telah melengkapi persyaratan berkendara yang salah satunya berupa bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

TAHUN	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN	KONTRIBUSI
2008	3,052,380,691.45	5,203,027,494.00	58.67%
2009	3,219,901,598.65	5,696,660,051.00	56.52%
2010	3,875,930,449.68	6,229,527,178.68	62.22%
2011	4,599,046,986.90	7,038,908,737.17	65.34%

Sumber : DPPKAD Provinsi Jawa Tengah

J. KESIMPULAN

1. Pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Jawa Tengah yang selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja keuangan daerah provinsi Jawa Tengah yang baik sehingga mampu mengimbangi peningkatan beban belanja yang setiap tahunnya juga meningkat.
2. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Jawa Tengah yang dari tahun 2008 hingga tahun 2011 berada di atas angka 80 persen menandakan tingkat kemandirian fiscal daerah provinsi Jawa Tengah yang kuat sehingga kesinambungan pembangunan di masa yang akan datang lebih terjamin.

3. Elastisitas pendapatan asli daerah atas produk domestic regional bruto yang mendekati angka 1 pada tahun 2009 dan 2010 serta lebih dari 1 pada tahun 2011 menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah mampu mengembangkan potensi yang tersedia dalam rangka peningkatan sumber pendapatan khususnya yang berasal dari wilayahnya.
4. Pajak daerah provinsi Jawa Tengah yang lebih 99 persen berasal dari kendaraan bermotor telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan asli daerah maupun total pendapatan daerah provinsi Jawa Tengah.

K. REKOMENDASI

1. Pemerintah provinsi Jawa Tengah mampu menjaga kondisi kerja yang sudah cukup baik khususnya dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga kepuasan masyarakat pembayar pajak dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Mengingat sebagian besar pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah ini berasal dari kendaraan bermotor, maka sudah selayaknya pemerintah provinsi Jawa Tengah lebih meningkatkan pembangunan infra struktur berupa jalan sehingga kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara masyarakat di Jawa Tengah dapat ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Chaidir. 2005. Desentralisasi dan Peluang Daerah (Riau) di Masa Depan, Sebuah Pandangan Umum dalam Haris, Syamsuddin (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Harun, Amrullah dan Pan Budi. 2006. *Indikator Makro Sosial-Ekonomi sebagai Pengukuran Kinerja Daerah: Kasus Kabupaten Bangka*.
- Imawan, Riswandha. 2005. Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance dalam Haris, Syamsuddin (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Pratikno. 2005. Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah, dalam Haris, Syamsuddin (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Syaukani. 2005. Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Implementasi Otonomi Daerah, dalam Haris, Syamsuddin (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

www.bapenas.go.id

www.djpk.depkeu.go.id